

The background features a decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes, each with a lighter blue ring around it. These circles are arranged in a vertical line, with the largest at the top and bottom, and a smaller one in the middle. Two thin blue lines intersect at the top left, forming a large 'V' shape that frames the central text area.

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RENCANA KERJA
(RENJA)TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Biro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dititikberatkan pada Pengendalian Pembangunan Sumatera Barat. Reformasi yang mengarah kepada demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi dan *good governance* menyebabkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu berbenah diri untuk mengantisipasi perubahan zaman. Kejelasan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan dapat membawa *stakeholder* memasuki persaingan global dengan rasa percaya diri dan siap untuk bersaing.

Rencana Kerja Tahun 2023 adalah salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke depan. Pada dasarnya program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan Tahun 2023 merupakan salah satu cara dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi terhadap penyelenggaraan pengendalian pembangunan, namun diharapkan setidaknya dapat mengatasi beberapa isu/masalah mendesak yang dihadapi oleh Biro Admisnitrase Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu dukungan dan komitmen dari seluruh lini staf dan *stakeholder* lainnya kami harap dapat mendukung dan menjalin kerjasama kemitraan yang baik sehingga apa yang

kita cita-citakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengendalian pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel dapat dicapai Tahun 2023.

Akhirnya kepada seluruh aparaturnya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan diharapkan dapat mempedomani Rencana Kerja Tahun 2023 ini sebagai wujud transparansi dan arahan operasional dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembangunan.

Padang, 27 Juni 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



H E F D I, SH, M.Si

NIP. 19640915 199003 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	13
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020	13
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	21
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah	47
3.3. Tujuan dan Sasaran	48
3.4. Program dan Kegiatan	49
BAB V PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perencanaan. Dalam sistem pembangunan holistik, perencanaan merupakan bagian terpenting dalam penentuan arah, bentuk, pembiayaan, kebijakan serta prioritas pembangunan. Sebagai satu kesatuan, perencanaan dan pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif, akuntabel, transparan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsepsi ekonomis, efisien dan efektif. Keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan baik berdasarkan keruangan maupun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan perencanaan yang didasarkan ruang adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat Nagari/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Sementara itu berdasarkan waktu pelaksanaannya dikenal dengan Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM/Renstra OPD) dan Jangka Pendek (RKPD/Renja OPD). Dalam proses perencanaan selanjutnya, RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD digunakan oleh pemerintah/daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya dinyatakan bahwa Renja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok

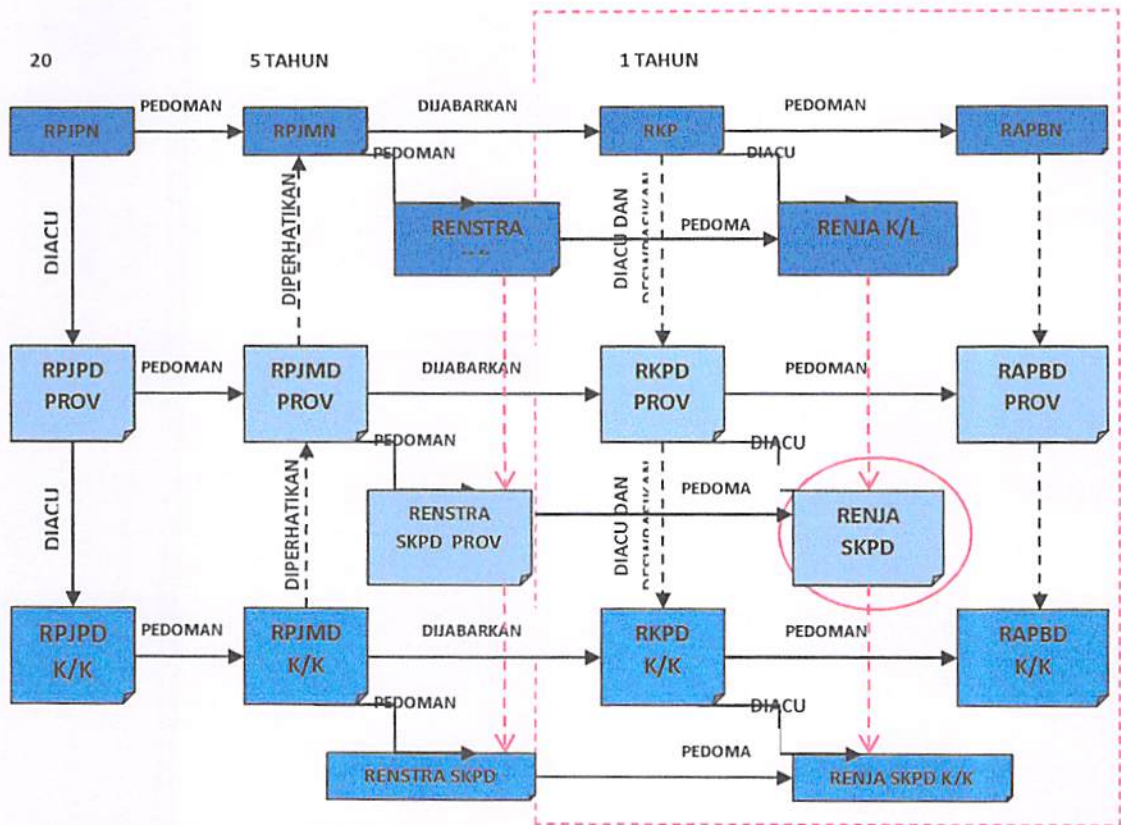
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat memiliki arti strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD untuk memasukkan program/kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Agar Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dengan Renja Perangkat Daerah dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Hubungan antar dokumen perencanaan di tingkatan Pemerintah sampai Pemerintah Daerah

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKP Daerah.

Proses penyusunan Renja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana dalam peraturan tersebut dicantumkan beberapa aturan yang harus dipedomani dalam penyusunan Renja. Berdasarkan tata cara penyusunan Renja bahwa setiap OPD perangkat daerah harus membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah. Adapun Tim Penyusun Renja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 - 31402 - 34425 Padang
<http://www.bap.sumbarprov.go.id>, [email:biroadmpembangunan.sumbarprov@gmail.com](mailto:biroadmpembangunan.sumbarprov@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 04/KPTS-BAP/XII-2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2023 PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi, organisasi perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
 - b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Renja 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 6. SE Gubernur Nomor 050/2613/II/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 sampai ditetapkannya Rencana Kerja dengan Surat Keputusan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan penyusunan Renja 2023 ini tidak tersedia anggaran khusus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2021

**An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
u.b Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Luhur Budianda, SY. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197010061989081001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSr-E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 04/KPTS-/BAP/XII-2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2023 PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan
2.	Sekretaris	Kasubag Tata Usaha
3.	Kelompok Kerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.	Kelompok Kerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
5.	Kelompok Kerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
6.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Tata Usaha

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Luhur Budianda, SY. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197010061989081001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Untuk proses penyusunan Renja 2023 ini Biro Administrasi Pembangunan yang berpedoman terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum dapat dilaksanakan maksimal yang harus berdasarkan RKPD, hal ini disebabkan RKPD tahun 2023 belum selesai di buat mengakibatkan proses penyusunan Renja 2023 hanya berpedoman terhadap RPJMD dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/816/XI/P2EPD/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
17. Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 04/KPTS/BAP/XII-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahun 2023 pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola dalam penyelenggaraan tata laksana organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
2. Mewujudkan realisasi fisik dan keuangan pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

3. Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan di Sumatera Barat ;
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam program satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat tahun lalu, dan realisasi Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

4. Lampirkan Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan dengan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program dan kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Table rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- a. Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan dikaitkan dengan target pencapaian Renstra serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dapat diperoleh bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang berdasarkan realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Untuk Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan Januari s.d Mei 2021 berdasarkan struktur Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat. Bulan Juni s.d Desember 2021 melaksanakan kegiatan berdasarkan struktur Biro Administrasi Pembangunan. Pada awal tahun anggaran 2021 terhadap Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau mendapat alokasi pagu anggaran APBD sebesar Rp 3.037.232.400,- dengan realisasi sebesar Rp 629.142.488,- (20,29%). Sedangkan Biro Administrasi Pembangunan mendapatkan alokasi pagu anggaran APBD sebesar Rp. 1.678.058.510,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.644.626.760,- (98,01%) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Januari s.d Mei 2021
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 1.031.811.800,-	Rp. 281.260.205,-	27,25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.368.000,-	Rp. 6.744.500,-	18,04
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 21.430.000,-	Rp. 4.600.000,-	97,33
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.938.000,-	Rp. 2.144.500,-	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 151.067.000,-	Rp. 28.335.000,-	100
2.a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 135.480.000,-	Rp. 317.735.301,-	99,57
2.b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 15.587.000,-	Rp. 2.500.000,-	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 24.480.000,-	Rp. 3.000.000,-	12,25
3.a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 24.480.000,-	Rp. 3.000.000,-	12,25
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 19.752.000,-	Rp. 6.894.000,-	34,90
4.a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 19.752.000,-	Rp. 6.894.000,-	34,90
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 586.070.966,-	Rp. 317.735.301,-	54,21
5.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 270.801.800,-	Rp. 0,-	0
5.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 49.308.300,-	Rp. 0,-	0
5.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 13.370.000,-	89,13
5.d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 9.760.000,-	Rp. 1.220.000,-	12,5
5.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 241.200.866,-	Rp. 145.177.715,-	60,18
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 138.213.834,-	Rp. 49.211.990,-	35,60
6.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 116.183.334,-	Rp. 48.711.990,-	41,92
6.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 22.030.500,-	Rp. 500.000,-	2,27
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.860.000,-	Rp. 49.211.990,-	65,73
7.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 26.150.000,-	Rp. 16.107.000,-	61,59
7.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 40.600.000,-	Rp. 11.200.000,-	27,58
7.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 8.110.000,-	Rp. 0,-	0
II	PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp. 300.000.000,-	Rp. 156.611.126,-	52,20

1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 156.611.126,-	52,20
1.a	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Rp. 200.000.000,-	Rp. 142.606.601,-	71,30
1.b	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rp. 50.000.000,-	Rp. 6.514.525,-	13,02
1.c	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp. 50.000.000,-	Rp. 7.490.000,-	14,98
III	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 1.705.420.600,-	Rp. 317.735.301,-	18,63
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 959.176.000,-	Rp. 117.887.349,-	12,29
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 299.216.000,-	Rp. 66.977.289,-	92,56
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 251.690.000,-	Rp. 24.559.467,-	99,14
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 408.270.000,-	Rp. 26.350.593,-	6,45
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 746.244.600,-	Rp. 73.383.808,-	9,83
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 151.312.200,-	Rp. 0,-	0
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 467.120.400,-	Rp. 73.383.808,-	9,83
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 127.812.000,-	Rp. 0,-	0

Tabel 2
Realisasi Anggaran Juni s.d Desember 2021
Biro Administrasi Pembangunan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rp. 683.039.421,-	Rp. 679.815.642,-	99,53
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 21.623.500,-	Rp. 21.589.500,-	99,84
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 11.830.000,-	Rp. 11.827.000,-	99,97
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 9.793.500,-	Rp. 9.762.500,-	99,68
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 64.480.000,-	Rp. 64.235.000,-	99,62
2.a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 55.140.000,-	Rp. 55.140.000,-	100
2.b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 9.340.000,-	Rp. 9.095.000,-	97,38
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 11.198.000,-	Rp. 10.962.500,-	97,90
3.a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 11.198.000,-	Rp. 10.962.500,-	97,90
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 454.326.633,-	Rp. 453.946.660,-	99,92
4.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 260.943.796	Rp. 260.943.796,-	100
4.b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 49.308.300,-	Rp. 49.308.300,-	100
4.c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.630.000,-	Rp. 1.630.000,-	100
4.d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 2.867.000,-	Rp. 2.867.000,-	100
4.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 139.577.537,-	Rp. 139.197.564,-	99,73

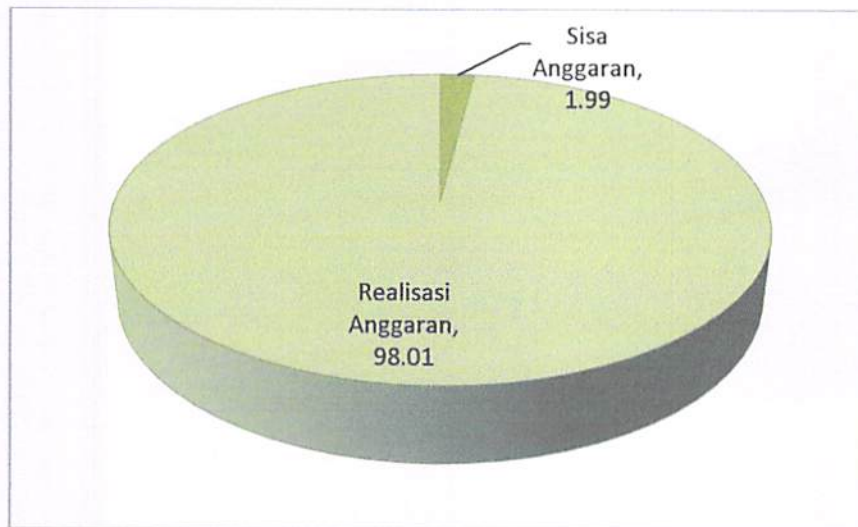
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 66.101.288,-	Rp. 65.501.649,-	99,09
5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 64.576.288,-	Rp. 64.358.752,-	99,66
5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.525.000,-	Rp. 1.142.897,-	74,94
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 65.310.000,-	Rp. 63.580.333,-	97,35
6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan	Rp. 27.800.000,-	Rp. 27.011.328,-	97,16
6.b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 29.400.000,-	Rp. 28.659.005,-	97,48
6.c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 8.110.000,-	Rp. 7.910.000,-	97,53
II	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp. 995.019.089,-	Rp. 964.811.118,-	96,96
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 665.111.305,-	Rp. 656.141.721,-	98,65
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 142.882.844,-	Rp. 141.455.148,-	99,00
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 198.016.387,-	Rp. 191.138.084,-	96,53
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 324.212.074,-	Rp. 323.548.489,-	99,80
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 327.907.784,-	Rp. 308.669.397,-	93,56
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 40.000.000,-	Rp. 38.952.000,-	97,38
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 244.478.215,-	Rp. 226.814.327,-	92,77
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 45.429.569,-	Rp. 42.903.070,-	94,44

Pada tahun 2021 untuk Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau terdapat 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan diantaranya merupakan target kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Sedangkan Pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, 8 kegiatan diantaranya merupakan target kinerja Biro Administrasi Pembangunan. Adapun realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Adapun realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table dan grafik dibawah ini :

Tabel 3
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Total Belanja Daerah	1.678.058.510	1.644.626.760	98,01
1.	Belanja Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	683.039.421	679.815.642	99,52
2.	Kebijakan Administrasi Pembangunan	995.019.089	964.811.118	96,96

Persentase Realisasi Anggaran



Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan selama tahun 2021.**

Program dan Kegiatan

A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 6 Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 683.039.421 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun uraian realisasi kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 21.623.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.589.500,- (99,84%).**

a. Output

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Outcomes

- Tersedia Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah

c. Permasalahan dan Solusi

- Nihil

- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 64.480.000,- dan realisasi sebesar Rp.64.235.000,- (99,62%)**

a. Output

Terlaksananya tertib administrasi keuangan

b. Outcome

Terwujudnya tertib administrasi keuangan

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

3) Adminsitration Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 11.198.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.962.500,- (97,90%)

a. Output

Terlaksananya tertib administrasi barang milik daerah

b. Outcomes

Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah

c. Permasalahan dan Solusi

Nihil

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 454.326.633,- dan realisasi sebesar Rp. 453.946.660,- (99,92%)

a. Output

Terlaksananya administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan

b. Outcomes

Terwujudnya administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 66.101.288,- dan realisasi sebesar Rp. 65.501.649 (99,09%)

a. Output

Terlaksananya penunjang urusan kantor

b. Outcomes

Terwujudnya penunjang urusan kantor

c. Permasalahan dan Solusi : Nihil

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 65.310.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.580.333,- (97,35%)

a. Output

Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

b. Outcomes

Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah

c. Permasalahan dan solusi : Nihil

B. Kebijakan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 995.019.089 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 665.111.305,- dan realisasi sebesar Rp. 656.141.721,- (98,65%)

a. Output

Termonitornya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota dan Dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat

b. Outcomes

Tersedianya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat, Pemerintah Kab/Kota dan dana APBN yang dilaksanakan di Sumatera Barat

c. Permasalahan dan solusi

- SKPD masih belum terbiasa berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan sehingga pengendalian permasalahan kegiatan terpencar-pencar di beberapa SKPD

- Kabupaten/Kota masih belum terbiasa melaporkan realisasi fisik dan keuangan kepada Biro Administrasi Pembangunan dengan menggunakan aplikasi Simbangda.
- Sulitnya memberi pemahaman kepada KPA/PPTK terhadap pentingnya administrasi kegiatan yang akan mempengaruhi penyediaan evidence oleh operator SKPD dalam menginput ke aplikasi SBE.
- Masih banyaknya sektor-sektor yang belum terfasilitasi sehingga pekerjaan banyak yang terbengkalai karena terjadinya refocusing anggaran.

2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 329.907.784,- dan realisasi sebesar Rp. 308.669.397,- (93,56%)

d. Output

Terlaksananya realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat

e. Outcomes

Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan OPD Sumatera Barat

f. Permasalahan dan solusi

- SKPD masih belum terbiasa berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan sehingga pengendalian permasalahan kegiatan terpencar-pencar di beberapa SKPD

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pengukuran kinerja tahun 2021 merupakan pengukuran tahun terakhir Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 dengan kondisi nama nomenklatur OPD yang berbeda-beda. Untuk tahun 2016 nama nomenklatur Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau, tahun 2017 bernama Biro Kerjasama dan Rantau. Tahun 2018 nama nomenklatur OPD berubah menjadi Biro Administrasi

Pembangunan. Di tahun 2021 berubah menjadi Biro Administrasi Pembangunan. Dengan berbedanya nama nomenklatur mengakibatkan terjadi perbedaan juga terhadap tugas pokok dan fungsi biro. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, untuk bulan Januari s.d Mei 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) target indikator kinerja. Selanjutnya untuk bulan Juni s.d Desember 2021 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) target indikator kinerja. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2021
(Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 - Berdasarkan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP	-	0	0	0	0	9 dokumen	5 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja Biro Adpim yang disusun	-	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat		-	0	0	0	0	100 %	100 %	

	Daerah																								
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang disediakan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang dilakukan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

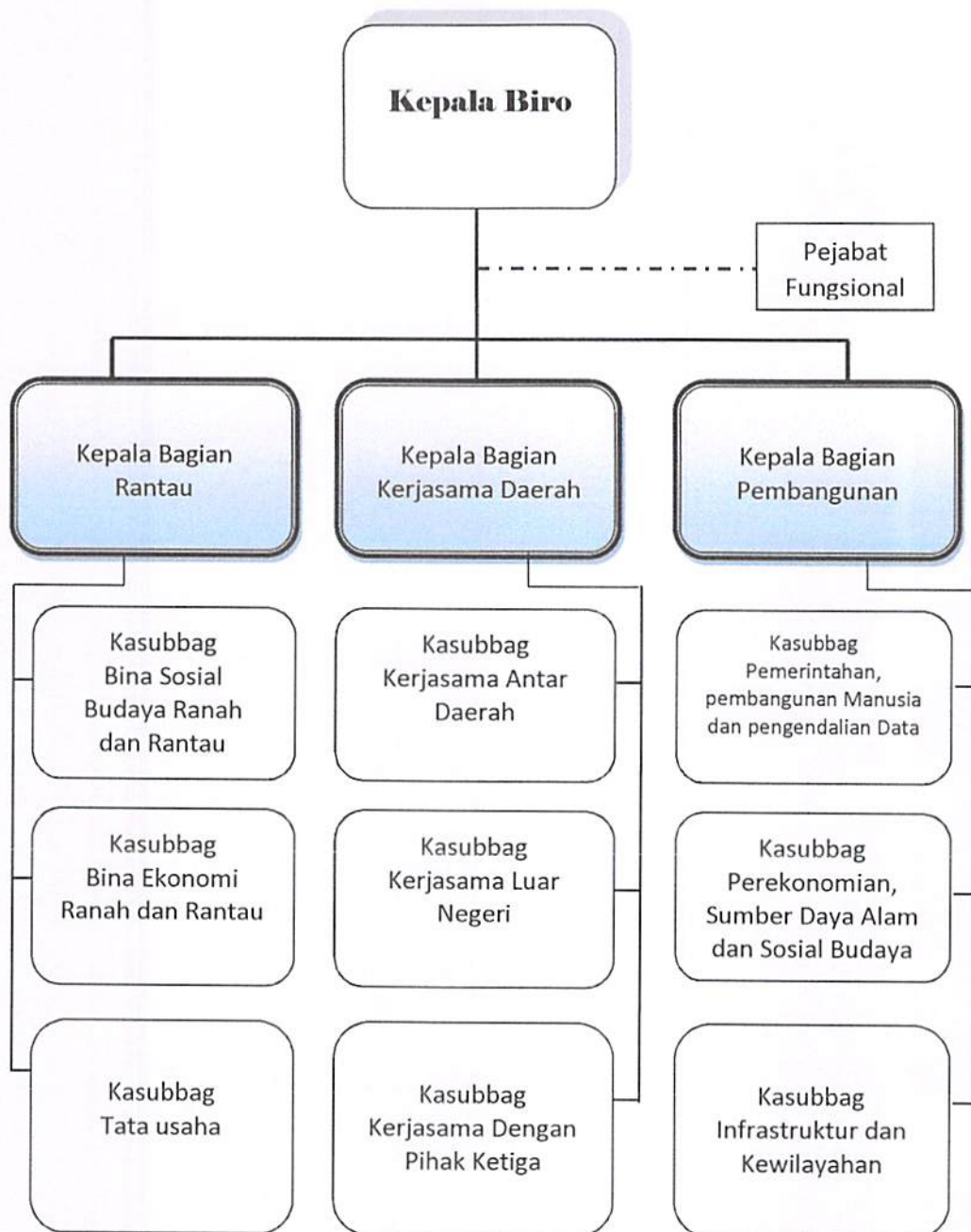
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	-	0	0	0	0	0	0	1000 surat	1000 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon dan internet	-	0	0	0	0	0	0	1 rek telp, 3 paket TV kabel, 10 bln ZM	1 rek telp, 3 paket TV kabel, 10 bln ZM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		0	0	0	0	0	0	1 unit	1 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	0	0	0	0	0	0	2 unit	2 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin yang dipelihara	-	0	0	0	0	0	0	7 bulan	7 bulan
KEBUJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi fisik dan keuangan		0	0	0	0	0	0	60 %	60 %
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan		0	0	0	0	0	0	60 %	60 %
Pengendalian Administrasi	Persentase realisasi fisik dan keuangan	-	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi	Pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan APBD	APBD	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dan pengendalian 7 bulan	dan pengendalian 7 bulan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 buku data Pemb APBN, 7 bulan pelaksanaan koordinasi, mpnev dan Rakor/Rapat evaluasi	1 buku data Pemb APBN, 7 bulan pelaksanaan koordinasi, mpnev dan Rakor/Rapat evaluasi
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase realisasi fisik dan keuangan Kab/Kota	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 bulan Koordinasi dan pengendalian Kab/Kota, 19 Kab/kota monev dan koordinasi APBD/APBN, Evaluasi 3 kali	7 bulan Koordinasi dan pengendalian Kab/Kota, 19 Kab/kota monev dan koordinasi APBD/APBN, Evaluasi 3 kali
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pembangunan Daerah	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 %	60 %
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 bulan monev dan rakor capaian kinerja pembangunan daerah, 3 dokumen laporan kinerja pembangunan daerah	7 bulan monev dan rakor capaian kinerja pembangunan daerah, 3 dokumen laporan kinerja pembangunan daerah
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Percepatan penyerapan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan daerah	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 bln koordinasi dan fasilitasi pelaporan, 2 laporan APBD/APBN/Kab/Kota, 19 kab/kota pembinaan SBE, 1 sistem IT dan 19 Kab/Kota replikasi SBE	7 bln koordinasi dan fasilitasi pelaporan, 2 laporan APBD/APBN/Kab/Kota, 19 kab/kota pembinaan SBE, 1 sistem IT dan 19 Kab/Kota replikasi SBE
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kebijakan teknis yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 dok produk hukum (HSPK dan SE kebijakan), 7 bln rakor kebijakan teknis pembangunan daerah	2 dok produk hukum (HSPK dan SE kebijakan), 7 bln rakor kebijakan teknis pembangunan daerah

Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat seperti terlihat pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017)



Gambar 2.

**Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020)**



2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan adalah seperti terlihat pada Tabel 7. Karena terjadinya perubahan struktur organisasi Biro maka dilakukan juga review terhadap indikator kinerja sesuai dengan struktur organisasi yang baru, seperti terlihat pada Tabel T-C.30 :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
1.	(2) Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	(3)	(4)	(5) 90%	(6) 91%	(7) 92%	(8) 93%	(9) 90,53%	(10) 98,29%	(11) 91%	(12) 93%	(13) Proyeksi merujuk pada realisasi tahun 2020	
2.	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN			90%	91%	92%	93%	90,53%	98,29%	91%	93%	Proyeksi merujuk pada realisasi tahun 2020	
3.	Kebijakan Administrasi pembangunan yang dihasilkan			2	2	1	1	0	2	2	2	Proyeksi merujuk pada realisasi tahun 2021	

Penghitungan Indikator 1 dan 3 pada tabel T-C.30 di atas dilakukan dengan metode survei sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan cara penghitungan sebagai berikut :

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} = \frac{\text{JUMLAH EVIDENCE DISETUJUI}}{\text{JUMLAH EVIDENCE YANG DI UPLOAD}} \times 100\%$$

$$98,29 \% = \frac{30.657}{31.189} \times 100\%$$

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA} = \frac{\text{JUMAH KAB/KOTA PENYAMPAIAN LAPORAN FISIK DAN KEU}}{\text{JUMLAH SELURUH KAB/KOTA}} \times 100\%$$

$$100 \% = \frac{19 \text{ kab/kota}}{19 \text{ kab/kota}} \times 100\%$$

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Humas adalah kemajuan teknologi informasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di era demokrasi dimana rakyat bebas, aktif, jujur, adil dan terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintah antara lain sebagai sebagai berikut:

- a. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur bagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan oleh PA/KPA/PPTK.
- b. Belum tersedianya peraturan terkait Pembangunan di Sumatera Barat sehingga belum ada kepastian hukum dan pegangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di lapangan
- c. Dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat, masa kontrak paket pun sudah mepet di tanggal 31 Desember 2021 sehingga banyak kegiatan yang telah selesai tetapi terkendala untuk pembayarannya. Dan juga terjadi peningkatan signifikan terhadap kegiatan yang diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran.
- d. Dengan adanya aturan baru terkait KPA dan PPTK, mengakibatkan pengurangan jumlah KPA dan PPTK sedangkan jumlah kegiatan tetap akibatnya KPA dan PPTK mendapat penambahan jumlah paket kegiatan

yang harus dilaksanakan yang signifikan. Sehingga waktu dan tenaga KPA dan PPTK terkuras habis hanya untuk menyiapkan administrasi kegiatan dan keuangan di kantor sedangkan untuk memantau pelaksanaan di lapangan tidak punya waktu lagi.

- e. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- f. Belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah
- g. Terlambatnya penunjukan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK dan Bendahara)
- h. Tingginya jumlah evidence yang harus divalidasi oleh helpdesk dan tidak memiliki honor .
- i. Dengan belum terintegrasinya Simbangda dengan aplikasi yang ada di OPD serta SIPD mengakibatkan helpdesk harus melakukan rekap tersendiri pada aplikasi Simbangda

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah, sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

No. Rek	Rancangan Awal RKPD 2023 (RP-JMD)babVII					No	Hasil Analisis Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	2.397.368.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	1.087.397.000	
4.01.01.1	Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85%	74.940.000		Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Sinkronisasi Pelaksanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	85%	88.000.000	
4.01.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Perencanaan Daerah yang disusun	2 dokumen	55.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	50.000.000	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	5.000.000	

4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	6.000.000	6.000.000	0	2 dokumen	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	6.000.000
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	10.000.000	7.000.000	0	2 dokumen	Kota Padang	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	7.000.000
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	8.000.000	6.000.000	0	2 dokumen	Kota Padang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	6.000.000
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	3 laporan	15.000.000	7.500.000	0	3 laporan	Kota Padang	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	3 laporan	7.500.000
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	40.938.000	7.500.000	0	4 dokumen	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	7.500.000
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	349.656.000	115.500.000	0	100%	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	115.500.000

4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	306.691.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	98.000.000
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	2 laporan	42.964.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	2 laporan	5.000.000
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	7.500.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	4.000.000
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	2 laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	2 laporan	8.000.000
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	60.451.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	44.500.000
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	4 unit	20.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	4 unit	20.000.000
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Kota Padang	Jumlah pengelola BMD SKPD yang	3 orang	12.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Kota Padang	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan	3 orang	12.000.000

	Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	dibayarkan honoronya	2 laporan		10.000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 laporan	5.000,000	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang	Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	5.000,000
4.01.01.1.03.05	Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	dibayarkan honoronya	2 laporan		7.500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	2 laporan	7.500,000	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Kota Padang	Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	7.500,000
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4	59.906.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	2 kali		59.906.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	2 kali	20.000.000	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kota Padang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 kali	20.000.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5	791.250.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	549.707.000	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	549.707.000
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 unit		100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 unit	100.000.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Padang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 unit	100.000.000

4.01.01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	10.000.000
4.01.01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	42 jenis	86.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	42 jenis	49.000.000
4.01.01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	20.000.000
4.01.01.1. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 jenis	5.000.000
4.01.01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 dokumen	377.742.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 dokumen	365.707.000
4.01.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	212.226.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	123.000.000
4.01.01.1. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	400 surat	212.226.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	400 surat	5.000.000

4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	10 mbps 1 rekening telepon	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	10 mbps 1 rekening telepon	8.000.000
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	3 orang	168.503.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	3 orang	110.000.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Kota Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	257.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	147.190.000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	72.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	49.190.000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	88.000.000

4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35 unit	35.000.000	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35 unit	10.000.000	
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Kota Padang	Persentase realisasi fisik dan keuangan	91%	7.347.540.000	9	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Kota Padang	1. Persentase realisasi fisik dan keuangan 2. Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN 3. Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan	92%	2.436.878.000	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang	Persentase realisasi fisik dan keuangan	91%	4.356.398.000	9	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang	1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat	92%	1.390.078.000	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kota Padang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi rapat-rapat Pengendalian	1 tahun	1.680.250.000		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kota Padang	1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbar 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari	1 tahun	419.104.500	

4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota Padang	Buku Data Pembangunan APBN Pelaksanaan Koordinasi DAK dan APBN Money DAK, TP Dekon terkait Pembangunan bersumber dana APBN Rakor Pengendalian dan Pembinaan pelaksanaan APBN (DAK, TP Dekon)	1 buku 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1.128.240.000.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Kota Padang	1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	1 tahun 1 tahun	299.295.500		
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kota Padang	Pelaksanaan Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD dan APBN Kab/Kota Pelaksanaan Money Rapat evaluasi dan pengendalian	1 tahun 19 Kab/Kota	1.547.908.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kota Padang	1. Persentase realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 2. Persentase realisasi keuangan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 3. Persentase realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kab/Kota 4. Persentase realisasi keuangan kegiatan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kab/Kota	19 Kab/Kota	671.678.000		
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	2.991.142.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang	1. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi 2. Persentase realisasi	92%	1.046.800.000		

4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah Laporan kinerja Pembangunan Daerah Money pelaksanaan analisis pembangunan daerah Rakor capaian kinerja pembangunan daerah	1 tahun 4 dokumen 1 tahun 1 tahun	957.889.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang	Jumlah hasil analisa triwulanan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah	4 dokumen	105.800.000		
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang	Koordinasi dan fasilitasi pelaporan (APBD, APBN Kab/kota) Pembinaan SBE Pengelolaan Sistem IT Biro Replikasi Simbangda Based Evidence Produk Hukum kebijakan Pembangunan		1.300.550.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang	1. Jumlah laporan bulanan pelaksanaan pembangunan daerah 2. Jumlah laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan daerah 3. Jumlah laporan tahunan pelaksanaan pembangunan daerah		551.000.000		
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis	Kota Padang		4 dokumen	732.703.000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis	Kota Padang	Jumlah rumusan kebijakan teknis pembangunan	2 dokumen	390.000.000		

	Pembangunan Daerah		Daerah (Pergub HSPK, SE Kebijakan) Rapat Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis pembangunan daerah	1 tahun			Pembangunan Daerah	daerah	1 tahun	
--	--------------------	--	---	---------	--	--	--------------------	--------	---------	--

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan Tahun 2021, indikator kinerja yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat, seperti disajikan pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

NO (1)	PROGRAM/KEGIATAN (2)	LOKASI (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	BESARAN/VOLUME (5)	CATATAN (6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka arah kebijakan pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

- a. Penciptaan Birokrasi efektif dan efisien
- b. Penciptaan Birokrasi yang melayani
- c. Penciptaan Birokrasi bersih dan akuntabel

Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu *"membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan"*.

Adapun Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

- Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Biro Administrasi Pembangunan untuk pelaksanaan kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pembangunan yang berupa dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan bukan merupakan Program Unggulan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan hanya sebagai penunjang urusan Skeretarait Daerah sehingga Biro Administrasi Pembangunan secara langsung tidak mempengaruhi kebijakan daerah dalam pelaksanaan kegiatannya.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2023, Renja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023 tidak mendukung secara langsung prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Namun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu *membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*”, maka dukungan Biro Administrasi

Pembangunan dalam pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2023 adalah memfasilitasi semua kegiatan pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan misi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan visi daerah yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada visi ketujuh RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”**

Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kepada **Misi 7** yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** “ dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan “ Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani “

Dari Visi, Misi dan Tujuan yang tersebut diatas **Strategi** yang akan dicapai Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan RPJMD 2021-2026 yaitu **“ Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah “** dengan **Arah Kebijakan** adalah **“ Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah”**

Sedangkan **Indikator Kinerja Kunci** Biro Administrasi Pembangunan adalah **“ Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (%) “**

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan maka didukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi. Adapun pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan yang disusun tersebut adalah:

1. Serasi dan selaras dengan program prioritas nasional dan daerah
2. Sesuai dengan tema pembangunan daerah
3. Mendukung arah kebijakan nasional dan daerah

Berdasarkan rumusan di atas maka program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel T-C.33

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Padang	100,00	1.087.397.000	APBD		100,00	2.871.377.800
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Padang	100,00	88.000.000	APBD		100,00	134.478.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Padang	100,00	50.000.000	APBD		100,00	60.000.000

Pemeriksaan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Padang	100,00	8.000.000	APBD		100,00	119.586.000
Koordinasian Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Padang	100,00	44.500.000	APBD		100,00	72.541.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	Padang	100,00	5.000.000	APBD		100,00	10.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang diasuransikan	Padang	100,00	20.000.000	APBD		100,00	25.000.000
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honoranya	Padang	100,00	12.000.000	APBD		100,00	14.061.000
Rekoniliasi dan Penyusunan Laporan BMD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Padang	100,00	3.000.000	APBD			8.000.000

					100,00	49.190.000	APBD		100,00	62.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Padang	100,00				APBD			
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Padang	100,00			88.000.000	APBD		100,00	97.704.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Padang	100,00			10.000.000	APBD		100,00	25.000.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1. Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD 2. Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN 3. kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan	Sumbang/ Luar Sumbang	92 %			2.436.878.000	APBD		93%	8.817.048.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat	Sumbang/ Luar Sumbang	92%			1.390.078.000	APBD		93%	5.237.837.600

					92%	419.104.500	APBD	93%	2.027.300.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov.Sumbar 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov.Sumbar	Sumber/ Luar Sumbar					93%		
					92%	299.295.500	APBD	93%	1.353.048.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN 2. Persentase realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	Sumber/ Luar Sumbar					93%		
					92%	671.678.000	APBD	93%	1.857.489.600
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1. Persentase realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 2. Persentase realisasi keuangan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 3. Persentase realisasi fisik kegiatan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kab/Kota 4. Persentase realisasi keuangan kegiatan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kab/Kota	Sumber/ Luar Sumbar					93%		
					92%	1.046.800.000	APBD	93%	3.579.210.400
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	. Persentase realisasi fisik SKPD Provinsi . Persentase realisasi keuangan SKPD Provinsi . Persentase kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan target	Sumber/ luar Sumbar					93%		

	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisa triwulanan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah	Sumber/ luar Sumber	dokumen	105.800.000	APBD	dokumen	1.149.466.800
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah laporan bulanan pelaksanaan pembangunan daerah 2. Jumlah laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan daerah 3. Jumlah laporan tahunan pelaksanaan pembangunan daerah	Sumber/ luar Sumber	dokumen	551.000.000	APBD	dokumen	1.550.500.000
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Sumber/ luar Sumber	dokumen	390.000.000	APBD	dokumen	879.243.600
	JUMLAH				3.524.275.000			11.688.375.800

Catatan : Pengisian Tabel ini berdasarkan hasil Tabel T-B.36

Berdasarkan Tabel T-C.33 tersebut diatas bahwa untuk tahun 2023 sebagai penunjang pekerjaan pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang sudah tercantum sesuai dengan Renstra 2021-2026, dan perkiraan penunjang kegiatan di tahun 2024 masih sama jumlah program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah pada tahun 2023 mempunyai 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. jumlah anggaran dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	RENCANA PENDANAAN	PENGAMPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	1.087.397.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85%	88.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA, SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 dokumen	23.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	115.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	3 Orang	98.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	2 dokumen	5.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	4,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran yang disiapkan	2 dokumen	8.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	44.500.000	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	1 dokumen	5.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	4 unit	20.000.000	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	3 orang	12.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	3.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	4.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Birtek yang dilaksanakan	2 kali	20.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	549.707.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 unit	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 jenis	49.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Kota Padang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 jenis	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 dokumen	365.707.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	123.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	400 surat	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	10 mbps 1 rekening telepon	8.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	3 orang	110.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	147.190.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	49.190.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	88.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35 unit	10.000.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan	91%	2.436.878.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan	91%	1.390.078.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	91%	419.104.500	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	91%	299.295.500	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan Kab/Kota	91%	671.678.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik	100%	6,056,288,589	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Terlaksananya analisis capaian kinerja Pembangunan Daerah	1 dokumen	105.800.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Percepatan penyerapan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan daerah	19 Kab/kota	551.000.000	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Kebijakan teknis yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	2 dokumen	390.000.000	

BAB V

PENUTUP

Recana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan turunan dari Review Rencana Strategis (Renstra) Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan jangka pendek daerah yang sudah dirancang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2023.

Dalam penyusunan Renja, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait masalah pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Renja sedapat mungkin mengupayakan adanya harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Pada Renja 2023 terdapat program/kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilakukan pengentiran pada Aplikasi SIPD akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan untuk tahun 2023. Kondisi tersebut bertujuan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di tahun 2023 sehingga dapat terwujudnya optimalisasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi hal tersebut Biro Administrasi Pembangunan sudah mengusulkan kebutuhan anggaran dan programkegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja 2023 diharapkan usulan tersebut dapat direalisasikan sehingga target realisasi fisik dan keuangan dan tercapai dengan maksimal.

Sementara itu harapan dari Renja ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.